

## **Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya**

### **Implementation Program Of Stunting Acceleration Decline At Posyandu Mojo Sub – District, Gubeng District, Surabaya City**

**Jihan Azizah Dwi Rahmawati<sup>1</sup>, Weni Rosdiana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya  
email: [Jihanazizah.20008@mhs.unesa.ac.id](mailto:Jihanazizah.20008@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya  
email: [wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

#### **Abstrak**

Program Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan terkait dengan kebijakan stunting di Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Analisis implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yang memiliki 6 indikator untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan 1) *Standar dan Sasaran Kebijakan*, belum maksimal karena beberapa program tidak telaksana dengan baik 2) *Sumber Daya*, kepekaan kader dengan keadaan masyarakat kurang optimal 3) *Hubungan Antar Organisasi*, hubungan komunikasi dengan masyarakat kurang baik, penyampaian informasi yang sangat minim 4) *Karakteristik Agen Pelaksana*, kader tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tidak ada sanksi yang tegas 5) *Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik*, kondisi ekonomi merupakan alasan terbesar anak terkena stunting, kondisi sosial masyarakat yang memiliki hambatan untuk membawa anak mereka ke Posyandu 6) *Disposisi Implementor*, kader mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah, namun dukungan dari kader untuk masyarakat sangat kurang.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Stunting, Posyandu

#### **Abstract**

*The Acceleration Program for Stunting Decline at Posyandu in Mojo Sub-district, Gubeng District, Surabaya City is one of the efforts by the Surabaya City Government to reduce the prevalence*

*of stunting in the city. POSYANDU serves as a crucial bridge between the community and health services. The objective of this research is to describe and analyze the implementation of policies issued by the Mayor of Surabaya in Regulation No. 79 of 2022 concerning the Acceleration of Stunting Decline in Surabaya City. This study employs a descriptive research design with a qualitative approach to realistically depict the situation and conditions. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with sample selection using purposive sampling. Data sources consist of primary and secondary data, and data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of this research is on policy implementation related to stunting policies in Mojo Sub-district, Gubeng District, Surabaya City. Policy implementation analysis in this study utilizes Van Meter and Van Horn's theory, which includes six indicators to assess the success of policy implementation: 1) Policy Standards and Objectives, These have not been fully achieved as several programs have not been effectively implemented. 2) Policy Resources, The responsiveness of the cadres to the community's situation is not optimal. 3) Inter-organizational Communication and Enforcement Activities, Communication with the community is poor, and the dissemination of information is very limited 4) The Characteristics Of The Implementing Agencies, Cadres lack discipline in performing their duties, and there are no strict sanctions 5) Economic, Social, Political Condition, Economic conditions are the primary reason children suffer from stunting, and social barriers prevent families from bringing their children to the Posyandu 6) The Disposition Of Implementors, Cadres receive maximum support from the government, but their support for the community is significantly lacking.*

**Keywords :** *Policy Implementation, Stunting, Posyandu*

## **Pendahuluan**

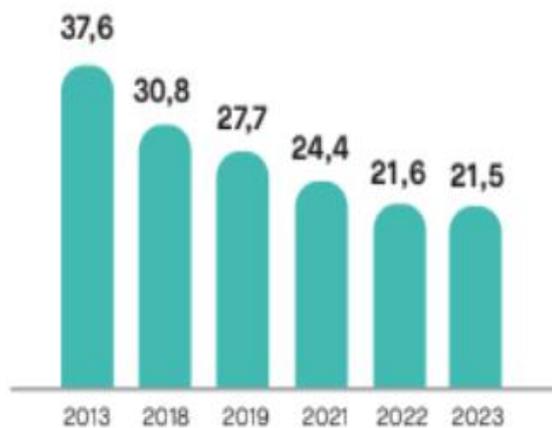
Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dihadapkan pada berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Sumber daya manusia dari sebuah negara merupakan pilar utama dalam upaya menjadikan sebuah negara menjadi negara yang maju. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, SDM menempati peran sentral dalam upaya pembangunan nasional Indonesia. Salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing adalah dalam aspek kesehatan. Dalam hal ini aspek kesehatan yang dimaksud adalah peningkatan dan perbaikan gizi di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengungkapkan “Tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang pangan dan gizi saat ini, yakni ketidakcukupan konsumsi pangan, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih kurang ideal, dan yang paling serius adalah masalah kurang gizi atau stunting pada anak balita” (Novrizaldi, 2020). Beliau juga menerangkan bahwa “Permasalahan gizi yang masih serius untuk dihadapi adalah stunting. Berdasarkan data RISKESDAS pada tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67 % dari jumlah balita di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting menjadi 14 % di tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024” (Novrizaldi, 2020).

Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak usia dini dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta perkembangan motorik pada anak. Kekurangan gizi juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh pada anak, fungsi pencernaan

anak, serta meningkatkan resiko penyakit kronis saat dewasa. Tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, kekurangan gizi pada anak juga akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak. Anak – anak yang mengalami kekeurangan gizi akan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti kecemasan, dan depresi. Survei Status Gizi Indonesia ( SSGI ) menunjukkan hasil prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 % turun menjadi 21,6% di tahun 2022 ( Rokom, 2023 ) dan ditahun 2023 berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia ( SKI) tahun 2023 mencatat angka prevalensi stunting sebesar 21,5 % (Kementrian Kesehatan, 2023) . *World Health Organization* ( WHO) menetapkan sebuah negara jika prevalensi stunting lebih dari 20 % akan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat dalam kategori golongan kronis, sehingga WHO menetapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia harus kurang dari 20%.

**Gambar 1. 1 Tren Stunting Pada Balita Indonesia Tahun 2013 - 2023**



*Sumber : Kementrian Kesehatan*

Standar prevalensi stunting yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting), untuk mencapai target angka prevalensi stunting secara nasional, ditetapkan target angka prevalensi stunting di Indonesia harus turun diangka 14 % . Kota Surabaya sebagai salah satu daerah di Indonesia , turut mengeluarkan peraturan tentang penanggulangan stunting. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menjabarkan bahwa stunting merupakan tantangan terbesar yang harus ditangani selama masa jabatannya. Setelah beliau dilantik menjadi wali kota, beliau langsung memfokuskan untuk menurunkan angka stunting. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Surabaya keluar untuk mendukung, membantu, serta menjadi pedoman bagi pemerintah kota dengan seluruh bagian pembangunan daerah untuk mendukung percepatan penurunan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Berikut adalah tujuan dari Peraturan Walikota :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam percepatan penurunan stunting di Daerah;

2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku untuk mencegah stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di Daerah.

Kota Surabaya mencetak rekor nilai prevalensi terendah di Indonesia dengan angka 4,8 % menurut SSGI di tahun 2022. Mengutip dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, angka prevalensi stunting di Surabaya mengalahkan Denpasar dengan nilai prevalensi sebesar 5,5% dan Jakarta Selatan dengan nilai 11.9 %. Pemerintah Kota Surabaya dalam jangka waktu 2 tahun berhasil menurunkan angka balita yang terindikasi stunting hingga 11.865 balita, di tahun 2020 terdapat 12.788 balita yang mengalami stunting dan diakhir tahun 2022 turun menjadi 923 balita. Dan diakhir tahun 2023 Kota Surabaya berhasil menurunkan angka balita yang mengalami stunting di angka 279 kasus. Nanik Sukritina selaku Kepala Dinas Kesehatan ( DINKES ) Kota Surabaya, mengatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Kota Surabaya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Surabaya menerangkan tentang peran lembaga kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 17 ayat. Menurut peraturan tersebut, salah satu lembaga kemasyarakatan yang memegang peran penting adalah POSYANDU. POSYANDU merupakan jenis upaya kesehatan bersumberdaya masarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan mengoptimalkan peran POSYANDU, pemerintah dapat menyediakan tempat untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan sektor pelayanan kesehatan. Diharapkan melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi yang dapat mempengaruhi pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Penanganan stunting di POSYANDU turut membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk dukungan moril, materil, dan finansial, kerjasama antara semua pihak turut dibutuhkan terutama pengabdian para pengelolanya termasuk kader yang turut serta membantu melaksanakan program dan harus memiliki dukungan partisipasi masyarakat yang aktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Rachman dkk., (2024) Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya sehingga mendapatkan pemahaman mengenai berbagai indikator seperti kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Sedangkan penelitian deskriptif menurut (Theng et al., 2022), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif

adalah penelitian yang menjelaskan gambaran dari data – data penelitian yang secara spesifik berdasarkan peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut (Moelong, 2018) penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata berdasarkan dengan apa yang terjadi dilapangan untuk menggambarkan serta menguraikan keadaan tantang implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini berlokasi di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Wilayah Posyandu Kelurahan Mojo sendiri terdiri atas 44 Posyandu salah satunya bertempat di Balai RW 4 Kelurahan Mojo yang terletak di Jalan Mojoklanggru Lor 70 Surabaya sebagai lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Pengertian data primer sendiri menurut (Hardani et al., 2020) adalah suatu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, perhitungan sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dll. Sedangkan untuk pengertian data sekunder menurut (Hardani et al., 2020) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui, Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, buku referensi, dokumen, literatur media massa dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini peneliti menentukan narasumber dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut (sugiyono 2013) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah narasumber yang akan diwawancarai memiliki informasi yang akurat dan dianggap paling kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh penlitit untuk mendapatkan data – data yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan data tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang di analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penlititia adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi menurut Usman dan Purnomo dalam (Hardani et al., 2020) Observasi sebagai pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi berfokus pada pengumpulan informasi yang dapat diamati langsung oleh peneliti tanpa mengandalkan laporan dari pihak lain. Wawancara menurut (Hardani et al., 2020) menjelaskan Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan untuk pengertian dokumentasi sendiri menurut sugiyono dalam (Hardani et al., 2020). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam bentuk tulisan, rekaman, laporan kegiatan, foto dokumentasi kegiatan Program Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo, Kecamatan

Gubeng, Kota Surabaya serta visualisasi data yang didapat sebagai bukti penelitian.

Teknis analisis data pada penelitian kualitatif dimulai dari sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani et al., 2020) proses analisis data terdiri atas 3 tahapan yaitu reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, atau penyederhanaan data yang muncul dari catatan di lapangan, tahapan selanjutnya yakni penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan terakhir penarikan kesimpulan, tahapan ini bertujuan untuk merangkum semua informasi sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau bahasan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini fokus penelitian didasarkan atas teori dari van Meter van Horn. Van Meter Van Horn menjabarkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yakni :

1. *Standar dan Sasaran Kebijakan*
2. *Sumber Daya*
3. *Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan*
4. *Karakteristik Agen Pelaksana*
5. *Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik*
6. *Disposisi Implementor*

## **Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan Publik menurut Carl I. Freidrich dalam (Mani & Guntoro, 2020) menjelaskan bahwa , kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu ,yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, kebijakan merupakan panduan atau pedoman tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan dan memanfaatkan sebuah peluang untuk mencapai tujuan tertentu, serta ketentuan untuk pengambilan keputusan dan bagaimana implementasinya. Oleh karena itu Program Percepatan Penurunan Stunting dapat dikategorikan sebagai kebijakan karena sebagai hasil dari tindakan yang pemerintah lakukan untuk mengatasi permasalahan gizi balita dan kasus stunting. Menurut Van Metter Van Horn terdapat 6 indikator yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Berikut ini menjelaskan mengenai analisis dari masing – masing indikator yang disampaikan oleh Van Metter Van Horn :

1. *Standar dan Sasaran Kebijakan*

Berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa tujuan yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi. Penelitian tentang Program Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan serta mengintegrasikan program penurunan stunting

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui strategi komunikasi yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam Program Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya menunjukkan para kader telah mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas dengan cukup baik. Puskesmas Mojo bersama dengan para kader Posyandu telah melaksanakan kegiatan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Adapun kegiatan – kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan Kampung ASI yakni kegiatan edukasi untuk kader posyandu dengan target sasaran oleh ibu menyusui tentang pemberian ASI yang baik dan benar serta pemberian MP- ASI dengan tetap memperhatikan gizi yang seimbang untuk anak, kemudian ada kegiatan Imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan balita di Posyandu, pemberian kapsul vitamin A, pemberian PMT bagi balita gizi kurang, pemberian PMT bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, penimbangan dan pengukuran di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita, edukasi atau konseling gizi serta kegiatan inovatif yang digagas oleh ahli gizi Puskesmas Mojo yakni “Mojo Masa Penting, Mojo Bebas Atasi Stunting” yang dilakukan bersama dengan para pihak terkait termasuk para kader Posyandu dengan isi kegiatan seperti edukasi memasak PMT lokal yang bergizi dengan diikuti oleh perwakilan kader Posyandu telah sukses menurunkan angka stunting pada Posyandu Kelurahan Mojo. Adapun standar keberhasilan yang diharapkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah tidak adanya kasus stunting di wilayah Posyandu Kelurahan Mojo, tingkat realisasi program diangka 100%, serta tingkat kehadiran peserta Posyandu mencapai angka 75% dari total masyarakat yang terdaftar di Posyandu. Meski banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di Posyandu, namun dalam implementasinya masih ada kendala yang ditemui.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama dengan masyarakat yang menjadi sasaran target dari program yang dilaksanakan, ditemukan bahwa tidak meratanya pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Meski bidan yang bertugas di Posyandu telah mengatakan bahwa semua ibu hamil yang terdaftar di Posyandu wajib mendapatkan tablet tambah darah, dalam realisasinya pemberian tablet tambah darah tidak merata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan para kader yang bertugas, terhadap ibu hamil di wilayah kerja para kader sehingga, beberapa ibu hamil tidak terdata sebagai penerima tablet tambah darah meski ibu hamil tersebut telah terdaftar di Posyandu. Selanjutnya adalah minimnya informasi dan edukasi perihal gizi maupun pemberian ASI terhadap masyarakat luas. Meskipun pihak puskesmas telah mengadakan sosialisasi maupun edukasi perihal gizi atau edukasi pemberian ASI, namun pada realisasinya adalah target sasaran yang datang seperti ibu menyusui tidak lebih dari 10 orang yang datang, sisanya adalah kader Posyandu yang menghadiri sosialisasi tersebut. Meski para kader telah menghadiri kegiatan edukasi perihal gizi maupun ASI namun informasi yang telah didapatkan tidak serta merta disebar secara luas kepada masyarakat yang tidak datang di sosialisasi tersebut sehingga masyarakat dengan target sasaran program percepatan penurunan stunting minim informasi terkait pemberian makanan dengan gizi seimbang ataupun pemberian ASI yang baik dan benar. Selain itu proses penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan di setiap kali pemeriksaan rutin di Posyandu juga tidak berjalan dengan maksimal, proses penyuluhan yang tidak maksimal ini membuat

masyarakat minim informasi perihal gizi anak, pola asuh anak, ataupun informasi – informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai target sasaran program.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya telah menunjukkan hasil yang baik, hal itu dibuktikan dengan menurunnya angka stunting di wilayah kerja Posyandu Kelurahan Mojo, pelaksanaan kegiatan posyandu telah mengikuti standar kebijakan yang telah ditentukan, meski begitu ada beberapa kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik, seperti pendistribusian tablet tambah darah bagi ibu hamil yang tidak maksimal, proses penyuluhan pada pemeriksaan rutin yang tidak maksimal, serta penyebaran informasi terkait dengan penanggulangan stunting yang tidak optimal. Sehingga, untuk mencapai keberhasilan dengan hasil yang optimal diperlukan perbaikan dalam realisasi program kepada target sasaran, terkhusus pada hal pendataan ibu hamil yang belum mendapatkan tablet tambah darah oleh kader posyandu, penyebaran luas informasi mengenai edukasi gizi yang baik kepada sasaran intervensi gizi spesifik oleh kader Posyandu agar dapat mencapai tujuan program secara optimal.

## 2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukan sumber daya yang berkualitas, baik sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh tiap individu yang terlibat dalam proses pengimplementasian. Ataupun sumber daya non-manusia seperti anggaran, infrastruktur, dan teknologi agar mendukung program berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan narasumber yang terkait dengan pengimplementasian program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo bahwa kader posyandu telah dibekali pengetahuan dengan mendapatkan arahan langsung dari pihak puskesmas serta telah mengikuti sosialisasi yang diberikan. Arahan yang diberikan juga mencakup dalam pemberian buku bacaan mengenai kader posyandu sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya. Secara umum masyarakat yang terdaftar di Posyandu mengatakan bahwa layanan yang diberikan di Posyandu telah terstruktur dimulai dari pendaftaran, kemudian dilakukan pengukuran atau penimbangan, kemudian dilakukan pencatatan dalam buku KIA, setelah itu pemberian kudapan dengan gizi seimbang untuk anak. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat mengeluhkan terhadap penyuluhan atau konseling gizi yang seharusnya disediakan di pemeriksaan rutin di Posyandu. Pihak kader posyandu mengatakan bahwa pemberian konseling gizi atau penyuluhan harus atas dasar inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk bertanya lebih dahulu kepada bidan maupun kader yang bertugas. Ketika masyarakat aktif untuk bertanya maka bidan atau kader yang bertugas akan dengan aktif menjawab pertanyaan yang diajukan. Jika sekiranya pertanyaan yang diajukan diluar kapasitas bidan atau kader untuk menjawab maka akan diarahkan langsung ke Puskesmas. Kepekaan kader dalam penyampaian informasi sangat kurang karena penyuluhan atau pemberian informasi harusnya dilakukan oleh kader ataupun bidan yang sedang bertugas tanpa menunggu masyarakat sebagai target sasaran bertanya, karena pada dasarnya itu sudah menjadi kewajiban dari para kader dan bidan untuk menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Kepekaan kader juga sangat kurang perihal pendataan masyarakat di lingkungan sekitar, hal ini dibuktikan ketika ada masyarakat yang sedang hamil tidak dilakukan pendataan untuk menerima manfaat pelayanan tablet tambah darah yang disediakan oleh Puskesmas dan disalurkan di Posyandu. Sehingga target sasaran seperti ibu hamil tidak bisa menikmati layanan pemberian tablet tambah darah gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Dari segi sumber daya non – manusia seperti anggaran dana dan infrastruktur juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa sumber utama anggaran dana untuk melaksanakan program yang ada di Posyandu berasal dari Puskesmas, sedangkan pihak Puskesmas mendapatkan dana salah satunya berasal dari Dinas Kesehatan. Dana yang berasal dari Dinas Kesehatan akan dimanfaatkan untuk pembuatan kudapan bagi anak yang akan dimasak oleh UMKM yang terdaftar. Selain itu pemberian PMT bagi ibu hamil atau balita kurang gizi berasal dari kementerian kesehatan, pemberian PMT bagi ibu hamil atau balita kurang gizi didasarkan pada data yang dimiliki oleh Posyandu. Adapun kegiatan yang lain yang dijalankan didanai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ). Tidak hanya berasal dari Puskesmas terkadang pihak Posyandu mendapatkan kerjasama dari pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program yang ada di Posyandu. Contohnya adalah pihak Posyandu bekerjasama dengan Alfamart, kerjasama yang dimaksud adalah pihak alfamart menawarkan voucher diskon untuk belanja di alfamart dan beberapa hadiah lainnya untuk masyarakat yang terdaftar di Posyandu, sedangkan pihak alfamart dapat memasarkan produk mereka ke pada ibu – ibu yang terdaftar di Posyandu. Untuk fasilitas sarana yang disediakan oleh Posyandu seperti alat timbangan bayi, pengukuran tinggi badan, alat ukur tensi sudah serba digital sehingga pengukuran yang dilakukan dapat dipastikan keakuratannya. Sedangkan untuk fasilitas prasarana yang disediakan oleh Posyandu tidak cukup memuaskan, dikarenakan tempat ruangan pemeriksaan yang kecil sehingga antrian untuk menunggu pemeriksaan ditempatkan diluar ruangan dimana udara diluar ruangan cenderung lebih panas. Sehingga, membuat rewel anak – anak yang sedang menunggu.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak kader posyandu harus meningkatkan inisiatif dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat dan pendataan terkait dengan target sasaran di lingkungan kerja mereka, agar tujuan dari pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo dapat tercapai. Sedangkan untuk perbaikan fasilitas prasaran pihak kader posyandu dapat mengkomunikasikan penambahan unit AC atau kipas angin dengan pihak RW setempat.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Pengimplementasian sebuah kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan dan membawa perubahan di lingkungan masyarakat. standar dan sasaran kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan jelas agar para pelaksana memahami hal apa yang harus mereka laksanakan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Komunikasi yang efektif selama proses implementasi dengan seluruh pihak dapat meminimalisir kesalahan dan meminimalisir kendala selama pelaksanaan program.

Implementasi program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo melibatkan berbagai pihak, dimulai dari pihak dinas kesehatan, tenaga dari puskesmas termasuk bidan, ahli gizi, psikolog, bidang sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya, melibatkan lintas sektor seperti kecamatan dan kelurahan serta dari sektor masyarakat dimulai dari kader – kader hingga masyarakat sebagai target sasaran intervensi gizi. Komunikasi yang dibangun antar pelaksana sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa kader posyandu rutin melaporkan kondisi masyarakat kepada pihak puskesmas, untuk selanjutnya jika ditemukan kasus balita dengan gizi buruk atau ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis ( KEK ) dapat diberikan tindakan serta pendampingan secara cepat oleh ahli gizi puskesmas untuk diberikan penanganan khusus. Tidak hanya komunikasi dengan pihak puskesmas yang dijalankan dengan baik, namun juga komunikasi dengan pejabat setempat seperti ketua RW juga sangat baik, ketua kader posyandu menyatakan bahwa beliau dengan anggota kader yang lain selalu bekoordinasi dengan ketua RW dalam pelaksanaan program – program yang dilaksanakan. Namun, meskipun komunikasi antar organisasi tidak mengalami hambatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan komunikasi yang terjadi antara kader dengan masyarakat kurang optimal. Contohnya perihal jadwal posyandu tidak ada pengingat jadwal untuk datang ke Posyandu, selain itu tidak meratanya pemberian informasi tentang gizi maupun program sosialisasi lainnya membuat masyarakat minim informasi terhadap gizi yang baik untuk anak mereka. Tidak hanya itu beberapa ibu hamil tidak mendapatkan tablet tambah darah karena tidak ada kader yang mendata. Sehingga komunikasi antar kader dengan masyarakat yang terhambat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan meskipun komunikasi internal oleh antar pelaksana tidak mengalami hambatan namun, komunikasi dengan masyarakat perlu diperbaiki. Dengan memperbaiki komunikasi kepada masyarakat diharapkan penyampaian informasi dapat diberikan secara merata sehingga dapat menambah tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu serta pemahaman masyarakat yang meningkat terhadap aspek – aspek yang perlu diketahui untuk mencegah stunting. Sehingga tujuan dari program percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif dan efisien.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam A Model of The Policy Implementation yang disampaikan oleh Van Metter Van horn (1975) salah satu indikator keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana. Dalam pengimplementasian kebijakan tidak terlepas dari karakteristik atau sikap dari agen pelaksana dari masing masing pelaksana kebijakan. Hal ini juga mencakup hubungan antara lembaga pelaksana dengan peserta lain dalam sistem penyampaian kebijakan, seperti masyarakat atau pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa para pelaksana seperti kader posyandu telah mendapatkan arahan langsung dari pihak puskesmas, sehingga jika para kader tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang ada contoh kader tidak melaporkan anak yang memiliki gizi buruk atau ibu hamil yang memiliki gizi buruk akan ada teguran bagi kader tersebut. Meski pihak puskesmas melakukan evaluasi atau analisis penyebab masalah jika ada target yang tidak dicapai namun, pada realitanya teguran yang ada tidak terlalu efektif dan efisien karena masih didapatkan beberapa kader yang tidak melakukan pendataan dengan

baik sehingga target sasaran intervensi gizi tidak mendapatkan layanan yang maksimal. Selain itu ditemukan fakta bahwa kader posyandu tidak terlalu informatif perihal pemberian konseling atau penyuluhan tentang gizi atau penyuluhan tentang pola asuh anak, harus ada inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk bertanya kepada kader posyandu ataupun bidan puskesmas yang sedang bertugas. Hal ini perlu dilakukan perbaikan dalam penyampaian informasi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bawasannya pengimplementasian kebijakan yang bertujuan untuk merubah perilaku membutuhkan agen pelaksana yang disiplin terhadap aturan yang berlaku, sehingga jika agen pelaksananya tidak disiplin terhadap peraturan yang berlaku pengimplementasian kebijakan akan mengalami hambatan atau permasalahan yang dapat mengakibatkan kegagalan kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini jika tujuan kebijakan adalah untuk mengubah perilaku maka harus ada sanksi yang tegas bagi kader posyandu yang tidak melaporkan data dengan benar serta tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan.

##### 5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan eksternal dapat menjadi penghambat dalam keberhasilan Program Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dikarenakan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar anak yang mengalami stunting berasal dari kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal ini terjadi karena pola asuh yang tidak benar seperti pemberian makanan terhadap anak yang tidak memperhatikan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Faktor sosial yang dimaksud adalah dukungan masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan fakta dilapangan bahwa ada beberapa masyarakat yang menolak untuk mengikuti kegiatan Posyandu karena telah memiliki dokternya sendiri, selain itu ada juga masyarakat yang tidak dapat datang ke Posyandu dikarenakan harus bekerja dan tidak dapat mengantarkan anaknya ke Posyandu. Selain itu ada masyarakat yang malas untuk mengantarkan anaknya ke Posyandu, hal ini disebabkan karena masyarakat merasa bahwa waktu tunggu yang diperlukan lebih lama daripada proses pemeriksaan yang hanya sekedar ditimbang sehingga membuat masyarakat merasa bahwa untuk datang ke Posyandu tidak sepadan dengan lamanya menunggu. Namun dari segi kondisi politik Pemerintah Kota Surabaya telah banyak membantu dalam pelaksanaan program. Hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dari implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Mojo. Pemerintah Kota Surabaya sangat memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan percepatan penurunan stunting yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian imunisasi dasar gratis yang disediakan. Selain hal itu pemberian vitamin A serta pemberian PMT bagi ibu hamil dan anak yang memiliki gizi buruk membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Dari hasil pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi lingkungan eksteral seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat sangat mempengaruhi keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan layanan gratis membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dengan ekonomi kurang. Namun partisipasi yang aktif dari masyarakat tetap di perlukan untuk mencapai keberhasilan program secara maksimal.

#### 6. Disposisi Implementor

Variabel terakhir adalah variabel disposisi implementor atau sikap pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan 3 indikator penting yakni respon implementor terhadap kebijakan, kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan yang terakhir adalah intensitas disposisi implementor. Ketiga aspek ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Posyandu Kelurahan Mojo. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para kader posyandu selaku bagian dari pelaksana percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya menyambut baik adanya program tersebut. Dukungan dari pemerintah Kota Surabaya saat ini juga mempengaruhi semangat para kader untuk terus aktif menekan angka stunting di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan para kader yang berusaha untuk menurunkan angka stunting dengan memberikan piagam penghargaan dan BPJS untuk para kader yang telah turut andil dalam suksesnya implementasi percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa para kader telah memahami apa saja hal yang harus para kader lakukan. Hal ini ditunjukkan ketika pihak puskesmas menginstruksikan untuk kader posyandu mengundang target sasaran sosialisasi untuk pemberian sosialisasi ASI Eksklusif. Pihak kader posyandu telah melaksanakan tugasnya dengan mengundang perwakilan target sasaran. Namun dikarenakan keterbatasan tempat yang ada tidak semua target sasaran dapat diundang. Pemberian undangan terhadap program tergantung pada seberapa aktif ibu itu mengikuti kegiatan di Posyandu. Selain itu para kader juga datang untuk menerima sosialisasi tersebut agar informasi yang disampaikan dalam sosialisasi dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang tidak datang. Namun, pada realitanya penyebaran informasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena tidak ada inisiatif program dari kader posyandu untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat yang jarang ikut ke Posyandu minim informasi terhadap pengetahuan gizi ataupun pemberian ASI.

### Penutup

Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan program yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya yang bertujuan untuk menekan angka stunting di Kota Surabaya hingga tidak ditemukannya kasus stunting di Kota Surabaya. Program tersebut dilaksanakan berlandaskan PERWALI Nomor 79 Tahun 2022. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 6 indikator yang menilai keberhasilan Program Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

#### a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Program Percepatan Penurunan Stunting yang berjalan di Posyandu Kelurahan Mojo telah memiliki standar dan sasaran kebijakan. Standar kebijakan yang dimaksud adalah

melakukan kegiatan intervensi gizi spesifik dengan target sasaran kebijakan yang telah ditentukan, sedangkan untuk sasaran kebijakannya sendiri adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 7 – 23 bulan, ibu menyusui dan anak usia 24 – 59 bulan. Program – program yang dijalankan di Posyandu seperti kegiatan imunisasi dasar lengkap, pemberian kapsul vitamin A, pemberian PMT bagi balita gizi kurang, pemberian PMT bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi atau konseling gizi, edukasi pembautan PMT lokal telah mengikuti arahan sesuai dengan isi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Kegiatan yang dilakukan di Posyandu Kelurahan Mojo dilaksanakan sesuai dengan arahan Puskesmas Mojo. Program yang dijalankan mampu untuk mengurangi angka stunting di Posyandu Kelurahan Mojo dari 10 kasus diakhir tahun 2023 menjadi 2 kasus dipertengahan tahun 2024. Meski telah berhasil menurunkan kasus stunting namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan pada program yang dijalankan sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan pada dan berdampak kepada target sasaran. Permasalahan tersebut yakni, tidak meratanya pemberian tablet tambah darah kepada sasaran target, selain itu proses penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan di setiap kali pemeriksaan rutin di Posyandu juga tidak berjalan dengan maksimal, serta penyebaran informasi terkait dengan penanggulangan stunting yang tidak optimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang disediakan oleh posyandu telah mengikuti pelatihan dan arahan yang disediakan oleh pihak puskesmas. Namun dalam pelaksanaan Posyandu terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari tidak adanya kader yang mengisi posisi di bagian penyuluhan. Meskipun ada bidan yang bertugas namun pemberian informasi mengenai gizi maupun tentang pola asuh anak tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kepekaan kader terhadap kondisi masyarakat sangat kurang, hal ini dibuktikan bahwa beberapa target sasaran seperti ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan pemberian tablet tambah darah karena tidak ada kader yang mendata target sasaran. Untuk sumberdaya non-manusia seperti teknologi, dana dan infrastuktur, pihak posyandu mendapatkan fasilitas seperti ketersediaan vitamin A, imunisasi dasar lengkap untuk balita, bantuan makanan tambahan bagi anak yang terkena stunting, bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil, bantuan tablet tambah darah semuanya berasal dari Puskesmas. Sedangkan pihak puskesmas mendapatkan dana bantuan dari Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya, serta dana bantuan operasional kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut dana BOK. Untuk pemberian fasilitas sarana yang diberikan dari puskesmas untuk posyandu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan di Posyandu. Seperti alat timbang digital, alat ukur tinggi badan, alat ukur tensi, dll. Sedangkan untuk prasarana yang disediakan oleh Posyandu perlu diadakan penambahan unit kipas atau AC di bilik Posyandu sehingga masyarakat yang datang bersama dengan anak mereka merasa nyaman.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya

Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pihak para pelaksana seperti kader dengan puskesmas, maupun kepada pejabat setempat sudah sangat baik, para

pelaksana selalu berkoordinasi satu sama lain dan secara rutin memantau kondisi gizi masyarakat yang terdaftar di Posyandu. Komunikasi yang terjalin antar kader dengan pihak puskesmas juga baik, sehingga jika ditemukan kasus gizi buruk, para kader akan mengkomunikasikan dengan pihak puskesmas sehingga dapat segera ditangani. Namun, komunikasi yang terjalin dengan masyarakat sangat kurang baik, dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terdaftar di Posyandu mengungkapkan bahwa untuk menghadiri kegiatan Posyandu mereka jarang untuk diingatkan terkait jadwal pelaksanaan Posyandu, mereka juga mengungkapkan bahwa mereka minim informasi terkait dengan informasi gizi dan program sosialisasi lainnya. Karena untuk mendapatkan informasi gizi diperlukan inisiatif dari masyarakat untuk bertanya kepada kader yang bertugas maupun bidan yang sedang menjalankan tugasnya. Dikarenakan komunikasi antara kader dengan masyarakat kurang baik, kader harus mengambil tindakan dengan lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat, contohnya seperti pembuatan grup whatsapp untuk saluran komunikasi yang efektif dan efisien.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup norma- norma yang mengatur perilaku interaksi antar anggota serta hubungan yang terjalin baik secara vertikal maupun horizontal. Dari hasil penelitian kader posyandu telah menerapkan arahan yang mereka terima dari puskesmas, contohnya seperti pendataan anak yang memiliki gizi buruk, jika ada anggota kader yang tidak melaporkan maka akan ada teguran . Namun, para kader kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya hal ini terlihat dari adanya permasalahan ibu hamil yang tidak terdata, meskipun para kader mendapatkan teguran namun teguran yang ada belum bisa membawa dampak perubahan bagi pelaksanaan implementasi kebijakan. Maka dari itu diperlukan sanksi yang tegas terhadap kader untuk bisa merubah perilaku pelaksana sehingga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap program – program yang dijalankan.

e. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki pengaruh dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat penting bagi keberhasilan program. Dalam pelaksanaannya terdapat tantangan seperti masyarakat yang enggan berpartisipasi, dikarenakan berbagai alasan seperti , tidak memiliki waktu untuk datang mengantarkan anaknya dikarenakan harus bekerja, atau enggan berpartisipasi dikarenakan telah memiliki dokter untuk berkonsultasi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan program, dari hasil penelitian yang dilakukan dari banyaknya kasus anak stunting banyaknya berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang, hal ini disebabkan karena kesalahan pola asuh atau tidak mampu menyediakan gizi seimbang, serta keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Namun pemerintah Kota Surabaya telah memaksimalkan memberikan bantuan dengan menyediakan bantuan makanan tambahan dan layanan imunisasi gratis di Posyandu membantu mengatasi beberapa kendala yang ada.

f. Disposisi Implementor

Kader posyandu selaku bagian dari pelaksana percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya menyambut baik adanya program tersebut. Dukungan dari pemerintah Kota Surabaya saat ini juga mempengaruhi semangat para kader untuk terus aktif membantu

pemerintah menekan angka stunting di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan para kader yang berusaha untuk menurunkan angka stunting dengan memberikan piagam penghargaan dan BPJS untuk para kader yang telah turut andil dalam suksesnya implementasi percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Para kader telah memiliki pemahaman terkait dengan program penurunan stunting dikarenakan para kader telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh puskesmas, namun penyebaran informasi yang dilakukan oleh kader terhadap masyarakat kurang maksimal. Hal ini terlihat dari tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dan Posyandu. Pemilihan target sasaran yang tidak merata membuat masyarakat yang tidak aktif mengikuti Posyandu minim informasi.

Memiliki saran:

- a. Pihak Kader Posyandu perlu untuk melakukan pendataan ulang kepada setiap masyarakat dilingkup kerja Posyandu , sehingga pihak Posyandu dapat mengetahui data terbaru dari masing – masing masyarakat, sehingga kader Posyandu dapat memilah serta mengidentifikasi informasi terkait dengan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan yang optimal terutama bagi ibu hamil yang memerlukan perhatian khusus.
- b. Pihak Kader Posyandu dapat membuat grup whatsapp berdasarkan dari hasil data yang telah didapatkan sebelumnya, agar mempermudah komunikasi antara kader dengan masyarakat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasi jadwal kegiatan Posyandu, serta pemberian tentang informasi terkini.
- c. Pihak Kader Posyandu perlu untuk mengembangkan program inovatif untuk mensosialisasikan informasi yang didapat dari Puskesmas, agar setiap masyarakat yang terdaftar di Posyandu, baik yang sering datang maupun tidak datang ke Posyandu sasar ama- sama mendapatkan informasi yang sama. Pihak Kader Posyandu dapat membuat selebaran atau buku bacaan perihal informasi pemberian gizi seimbang pada anak maupun informasi lainnya.
- d. Pihak Kader Posyandu dapat berkejasama dengan pihak swasta untuk mengadakan pemeriksaan rutin di Posyandu, seperti bekerjasama dengan minimarket terdekat seperti alfamart atau indomaret, dimana masyarakat yang datang untuk pemeriksaan di Posyandu dapat mendapatkan voucher belanja di minimarket tersebut. Hal ini akan menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu.
- e. Pihak kader posyandu harus lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pihak kader dapat menambah sumber daya agar dapat mengisi kekosongan bagian penyuluhan saat pemeriksaan posyandu dengan tetap mendapatkan pendampingan dari bidan maupun ahli gizi yang bertugas. Pemberian penyuluhan dapat dilakukan secara langsung saat pemeriksaan posyandu berlangsung atau mengunjungi rumah – rumah warga berdasarkan data yang dimiliki.
- f. Agar pelaksanaan posyandu sesuai dengan standar kebijakan yang ada, diperlukan sanksi tegas bagi kader yang tidak melakukan tugasnya dengan baik

## Referensi

- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; Cetakan Pertama). CV Pustaka Ilmu Group .  
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Kementrian Kesehatan. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023, September 27). *Rahasia Surabaya Turunkan Stunting Terendah Se Indonsia*. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Sekretariat Wakil Presiden . [https://stunting.go.id/rahasia-surabaya-turunkan-stunting-terendah-se-indonesia/#:~:text=SURABAYA%20\(stunting.go.id,9%20persen%20\(SSGI%202022](https://stunting.go.id/rahasia-surabaya-turunkan-stunting-terendah-se-indonesia/#:~:text=SURABAYA%20(stunting.go.id,9%20persen%20(SSGI%202022)
- Mani, L., & Guntoro, B. (2020). *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan Contoh Kasus Aplikasinya* (Cetakan Pertama). Remaja Rosdakarya.
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Novrizaldi. (2020, December 5). *Pembangunan Pangan dan Gizi Untuk Wujudkan SDM Unggul* . Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia .
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Surabaya (2022).
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (B. Ismaya, Ed.; Cetakan Pertama). CV Saba Jaya Publisher.
- Theng, B. P., Butarbutar, M., Anisah, H. U., Setyawati, C. Y., Nobelson, Islami, P. Y. N., Sari, I. P., Sufyati, Waruwu, D., Anwar, K., Dahlan, T., Sisca, & Triwardhani, D. (2022). *Metode Penelitian : Pendekatan Multidisipliner* (A. Sudirman, Ed.). CV Media Sains Indonesia.